

Pandangan Masyarakat Islam Nias terhadap Isu Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias

Ade Syafryan Pratama Lahagu¹, Katimin², Abu Syahrin³

^{1,2,3} Program Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: ade.s.p.l123@gmail.com

Abstrak

Kepulauan Nias adalah kepulauan yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, Indonesia, dan secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pulau ini merupakan pulau terbesar dan paling maju di antara jejeran pulau-pulau di pantai barat Sumatera, dihuni oleh mayoritas suku Nias (Ono Niha) yang masih memiliki budaya megalitik. Upaya pemekaran Kepulauan Nias berawal dari gagasan elit. Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias tentunya menjadi isu yang kompleks karena melibatkan banyak aspek, termasuk aspek sosial dan budaya masyarakat yang beragam, termasuk masyarakat Islam Nias. Dengan memahami pandangan dan sikap masyarakat Islam Nias, termasuk peran dan pandangan Ikatan Keluarga Masyarakat Islam Nias dalam proses pemekaran, diharapkan proses pemekaran Provinsi Kepulauan Nias dapat berlangsung secara partisipatif, inklusif, dan dapat mengakomodasi keberagaman budaya dan identitas sosial masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber yang digunakan berasal dari dua sumber data yaitu primer dengan cara wawancara dan sekunder dengan cara studi literatur dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan jika pemekaran wilayah menjadi Provinsi Kepulauan Nias memiliki pandangan yang beragam dari Masyarakat. Beberapa informan berharap agar kepentingan dan aspirasi masyarakat Islam diakomodasi dan memiliki ruang untuk menjaga nilai-nilai agama dan budaya mereka. Selain itu, pemekaran diharapkan tidak hanya membawa perubahan positif dalam infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga memperkuat persatuan dan kerukunan antar komunitas.

Kata kunci: *Pemekaran, Nias, Islam*

Abstract

The Nias Islands are an archipelago located to the west of Sumatra Island, Indonesia, and administratively part of North Sumatra Province. This island is the largest and most developed among the string of islands on the west coast of Sumatra, inhabited by the majority of the Nias ethnic group (Ono Niha), who still maintain a megalithic culture. The effort to expand the Nias Islands began with the idea from the elite. The expansion of the Nias Islands Province is certainly a complex issue as it involves many aspects, including the social and cultural aspects of diverse communities, including the Nias Muslim community. By

understanding the views and attitudes of the Nias Muslim community, including the role and perspective of the Nias Muslim Community Family Association in the expansion process, it is hoped that the process of expanding the Nias Islands Province can proceed in a participatory, inclusive manner, and accommodate the cultural diversity and social identities of the community. This research employs qualitative research methods. The sources used come from two data sources: primary data obtained through interviews and secondary data obtained through literature review from previous studies. The results show that the expansion of the Nias Islands Province has diverse perspectives from the community. Some informants hope that the interests and aspirations of the Muslim community will be accommodated and have space to maintain their religious and cultural values. Furthermore, the expansion is expected to not only bring positive changes in infrastructure and economy but also strengthen unity and harmony among communities.

Keywords : *Expansion, Nias, Islam*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beragam suku dan budaya yang menghuni wilayah-wilayahnya. Salah satu kelompok etnis yang menonjol adalah suku Nias di provinsi Sumatera Utara. Kepulauan Nias adalah kepulauan yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, Indonesia, dan secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kepulauan Nias memiliki Luas wilayah Kabupaten Nias yaitu ± 5.62 Km². Pulau Nias memiliki 4 kabupaten dan 1 kota yaitu, Kabupaten Nias dengan luas wilayah $\pm 853,4$ Km², Kabupaten Nias Utara dengan luas wilayah ± 1.202 Km², Kabupaten Nias Barat dengan luas wilayah $\pm 473,3$ Km², Kabupaten Nias Selatan dengan luas wilayah ± 1.825 Km², Kota Gunung Sitoli dengan luas wilayah ± 469 Km². Upaya pemekaran Kepulauan Nias berawal dari gagasan elit. Teori Elite oleh Sitepu menegaskan bahwa ialah yang mendasarkan pada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi ke dalam dua kategori yang luas yang mencakup: (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah, dan (b) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah.

Pada awalnya, elit yang terdiri dari elit pemerintah maupun elit non-pemerintah berupaya memperjuangkan pemekaran Kepulauan Nias menjadi provinsi tersebut diwakili pada masa kepemimpinan Bupati Nias yakni Binahati B. Baeha, S.H. Beliau menjadi penggagas dan perintis awal gagasan untuk memperjuangkan Kepulauan nias sebagai sebuah provinsi. Provinsi Kepulauan Nias menjadi salah satu daerah yang tengah menghadapi wacana pemekaran. Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias tentunya menjadi isu yang kompleks karena melibatkan banyak aspek, termasuk aspek sosial dan budaya masyarakat yang beragam, termasuk masyarakat Islam Nias. Masyarakat Islam Nias memiliki karakteristik sosial, budaya, dan agama tersendiri, yang dapat mempengaruhi pandangan dan sikap mereka terhadap isu pemekaran tersebut.

Dalam konteks pemekaran daerah, peran dan pandangan organisasi masyarakat juga penting untuk dipahami. Salah satu organisasi yang memainkan peran signifikan dalam masyarakat Islam Nias adalah organisasi Ikatan Keluarga Masyarakat Islam Nias (IKMIN)

yang ruang lingkupnya Kota Medan dan sekitarnya (Medan, Bijai, dan Deli Serdang). Organisasi ini memiliki jaringan yang luas dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan menyampaikan aspirasi mereka. Penelitian yang mengkaji pandangan masyarakat Islam Nias terhadap isu pemekaran di Provinsi Kepulauan Nias dengan fokus pada analisis Ikatan Keluarga Masyarakat Islam Nias menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

Dengan memahami pandangan dan sikap masyarakat Islam Nias, termasuk peran dan pandangan Ikatan Keluarga Masyarakat Islam Nias dalam proses pemekaran, diharapkan proses pemekaran Provinsi Kepulauan Nias dapat berlangsung secara partisipatif, inklusif, dan dapat mengakomodasi keberagaman budaya dan identitas sosial masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan memberdayakan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Islam Nias, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama.

Oleh karenanya, penulis tertarik mengkajinya dalam sebuah penelitian dengan judul "Pandangan Masyarakat Islam Nias Terhadap Isu Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias".

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi Pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias

Pendapat awal tentang usaha pemekaran Provinsi Kepulauan Nias telah menjadi topik yang sering dibicarakan oleh para tokoh masyarakat Nias, termasuk mereka yang tergolong dalam kalangan elit politik baik di tingkat pemerintahan maupun non-pemerintahan di tingkat lokal. Perencanaan untuk membentuk Provinsi Nias telah lama menjadi tujuan yang diidamkan oleh para pemimpin masyarakat di wilayah Kepulauan Nias secara umum. Pada tahun 2009, langkah-langkah awal telah ditempuh, menunjukkan bahwa elite politik telah mengambil langkah proaktif untuk merintis agenda pemekaran wilayah menjadi sebuah provinsi. Mereka tidak hanya mengambil inisiatif, tetapi juga berusaha melibatkan berbagai pihak dalam mendukung agenda ini, dengan Binahati Baeha memegang peran sentral dalam upaya tersebut. Di samping itu, pengumpulan fakta menunjukkan bahwa Binahati Baeha telah berusaha merancang strategi dengan memilih tokoh-tokoh yang dianggap mewakili beragam segmen masyarakat di Kepulauan Nias, dengan tujuan menggalang dukungan secara luas.

Pada tahun 2010, BPP-PKN memulai langkah-langkah untuk mendorong terbentuknya Provinsi Kepulauan Nias dengan menyampaikan aspirasi masyarakat Nias kepada Gubernur Sumatera Utara, sebagaimana tercantum dalam Surat BPPKN Nomor:

08/BPP-PN/2010 tanggal 6 April 2010. Kegiatan ini berupa audiensi antara perwakilan masyarakat Nias di Kota Medan, BPP-PKN, dan Gubernur Sumatera Utara.

Alasan di balik pembentukan Provinsi Kepulauan Nias adalah karena mempertimbangkan faktor rentang kendali dalam administrasi pemerintahan. Dalam konteks administratif, pelayanan yang disediakan oleh pemerintah setingkat daerah tingkat I (provinsi) terhadap koordinasi dengan pemerintah pusat (nasional) cenderung lebih efektif jika dibandingkan dengan daerah tingkat II seperti kabupaten atau kota.

Pada tahun 2011, Badan Pemeriksa Keuangan - Panitia Khusus (BPK-PKN) memperoleh dokumen Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Nomor 31/K/2011, yang merujuk pada Rekomendasi Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2011. Dokumen tersebut mengandung enam poin yang secara substansial memberikan saran untuk pembentukan Calon Provinsi Kepulauan Nias dari DPRD Provinsi Sumatera Utara. Salah satu tokoh pengamat politik di Provinsi Sumatera Utara, yakni Prof. Subhilhar, Ph.D, menyatakan bahwa wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki luas yang sangat besar. Dampak dari kondisi geografis ini adalah ketimpangan dalam pembangunan di wilayah tersebut. Dengan demikian, Prof. Subhilhar berpendapat bahwa Provinsi Sumatera Utara sebaiknya dibagi menjadi beberapa daerah otonom baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda.

Provinsi Sumatera Utara dikenal sebagai wilayah yang memiliki luas yang besar dan kondisi geografis yang beragam. Bagian daratan dan pegunungan serta wilayah kepulauan seperti Kepulauan Nias menunjukkan keberagaman tersebut. Namun, kondisi ini juga menyebabkan lambatnya pembangunan di wilayah-wilayah yang jauh dan sulit dijangkau. Pada tahap akhir tahun 2011, fokus utama adalah menyempurnakan Susunan Kepengurusan Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, yang secara resmi dilantik pada tanggal 21 Desember 2011. Susunan kepengurusan tersebut mencerminkan berbagai aktor yang terlibat dalam upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias.

Pada tahun 2012, kegiatan utama BPPPKN adalah pelaksanaan rapat kerja BPP-PKN di Gunungsitoli pada tanggal 14 Januari 2012. Langkah selanjutnya melibatkan pembentukan BPP-PKN Perwakilan Jakarta, Perwakilan Medan, dan perwakilan di setiap kabupaten/kota di Kepulauan Nias. BPP-PKN Perwakilan Jakarta dan Perwakilan Medan bertugas untuk membantu koordinasi dan memenuhi kebutuhan teknis serta administratif BPP-PKN yang berlokasi lebih dekat dengan instansi-instansi terkait. Hermit Hia, Ketua BPP-PKN, dalam wawancara dengan penulis menjelaskan bahwa pemekaran Provinsi Kepulauan Nias bukanlah berdasarkan pada isu etnisitas, melainkan dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan.

Pada tahun 2014, perubahan yang terjadi terkait pemekaran Provinsi Kepulauan Nias semakin menonjol. Mulai dari tahapan penyelesaian pembayaran terakhir biaya Penyusunan Kajian Daerah kepada Pusat Pengembangan Potensi dan Profesi (P3Pro) pada 16 Januari 2014, hingga Rapat Koordinasi dengan BPP-PKN Perwakilan Jakarta pada tanggal yang sama. Langkah ini diikuti dengan konsultasi/koordinasi bersama Badan Informasi Geospasial untuk pembuatan peta wilayah pada 17 Januari 2014. Kemudian, dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan BPP-PKN Perwakilan Medan pada 18 Januari 2014, dan rapat serupa kembali digelar pada 22 Januari 2014. Menurut informasi dari Wakil Ketua DPRD Kota

Gunungsitoli, Hadirat ST. Gea, tahun 2014 menghadapi dinamika dengan penundaan pengesahan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.

Peristiwa signifikan pada tahun 2014 mencakup penundaan pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB), yang juga mencakup Calon Provinsi Kepulauan Nias. Ini menjadi momen penting karena upaya pembentukan Provinsi Kepulauan Nias mengalami stagnasi. Selain itu, pergantian rezim dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo serta perubahan masa jabatan DPR RI dari 2009-2014 ke periode 2014-2019 juga berdampak pada dinamika politik nasional. Transisi kekuasaan tersebut menjadi faktor eksternal yang cukup berpengaruh terhadap upaya pembentukan DOB, khususnya Provinsi Kepulauan Nias.

Pandangan Masyarakat Islam Nias Terhadap Isu Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias

Peneliti telah melakukan interaksi langsung dengan sejumlah informan. Dari serangkaian wawancara yang dilakukan pada beberapa informan yang dipilih terkait dengan tanggapan mereka mengenai isu pemekaran provinsi Kepulauan Nias.

Berdasarkan wawancara dengan Ust Thamrin Lahagu, beliau menyatakan bahwa:

“Sebagai masyarakat Islam Nias, pandangan saya terhadap isu pemekaran Provinsi Kepulauan Nias sangatlah kompleks. Pertama-tama, saya melihat pemekaran ini sebagai sebuah potensi untuk mengembangkan daerah saya secara lebih baik, dengan fokus yang lebih terarah pada kebutuhan lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, saya juga memiliki kekhawatiran tentang bagaimana pemekaran ini akan memengaruhi identitas dan keberlanjutan budaya saya sebagai masyarakat Nias, termasuk masyarakat Islam di sini. Saya berharap bahwa dalam proses pemekaran ini, kepentingan dan aspirasi masyarakat Islam Nias tidak terabaikan, dan bahwa saya tetap memiliki ruang untuk menjaga nilai-nilai agama dan budaya saya yang khas. Saya ingin memastikan bahwa pemekaran Provinsi Kepulauan Nias tidak hanya membawa perubahan yang positif dalam hal pembangunan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga memperkuat persatuan dan kerukunan antara semua komunitas yang ada di pulau ini. Sebagai seorang ustad, saya juga merasa bahwa dalam konteks ini, penting bagi saya untuk terus mendorong nilai-nilai keadilan, toleransi, dan perdamaian, sehingga pemekaran Provinsi Kepulauan Nias dapat menjadi tonggak bagi kemajuan yang berkelanjutan bagi semua penduduknya, termasuk masyarakat Islam Nias.”

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan Pak Syamsuri Polem (PNS KESBANGPOL SUMUT), beliau mengatakan bahwa:

“Secara umum, saya melihat pemekaran ini sebagai sebuah proses yang memiliki potensi untuk memberikan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan saya. Di satu sisi, ada harapan bahwa dengan pemekaran ini, akan ada lebih banyak perhatian dan alokasi sumber daya yang diperuntukkan bagi wilayah saya, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, di sisi lain, terdapat juga kekhawatiran bahwa pemekaran ini mungkin akan menyebabkan pembagian sumber daya menjadi tidak merata dan memunculkan konflik kepentingan antarwilayah. Saya juga prihatin akan kemampuan pemerintahan yang baru terbentuk untuk mengelola provinsi yang lebih besar ini dengan efektif, terutama dalam menjaga keberagaman etnis dan agama serta mengatasi potensi konflik yang mungkin timbul.”

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Pak Din Rahmadhani Aceh (Ketua GM IKMIN), beliau mengatakan bahwa:

“Saya melihat pemekaran sebagai sebuah proses yang memiliki potensi untuk membawa perubahan signifikan dalam pemerintahan dan pembangunan daerah saya. Di satu sisi, saya menyambut langkah ini sebagai upaya untuk lebih mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat setempat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan saya sebagai masyarakat yang heterogen. Namun, di sisi lain, saya juga menyadari bahwa pemekaran ini dapat memunculkan tantangan baru, seperti penataan administratif dan alokasi sumber daya yang optimal, yang memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang cermat agar tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, termasuk masyarakat Islam Nias. Oleh karena itu, saya percaya bahwa proses pemekaran ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas Islam Nias, untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak diakomodasi secara adil dan berkelanjutan.”

Berikutnya wawancara dilakukan dengan bapak Rafsan Ali (PAN), beliau mengatakan bahwa:

“Di satu sisi, kami melihat potensi pemekaran ini sebagai peluang untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di wilayah kami. Kami berharap bahwa dengan adanya pemekaran, pemerintah dapat lebih fokus dan responsif terhadap kebutuhan kami sebagai masyarakat yang tersebar di kepulauan ini. Namun, di sisi lain, kami juga memiliki kekhawatiran tentang bagaimana pemekaran ini akan berdampak pada identitas dan keberlangsungan budaya kami sebagai masyarakat Nias. Kami ingin memastikan bahwa dengan adanya pemekaran ini, nilai-nilai budaya dan agama kami tetap dihormati dan dijaga dengan baik oleh pemerintah baru yang akan terbentuk.”

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa terdapat pandangan positif maupun negatif terhadap pemekaraan wilayah menjadi provinsi Kepulauan Nias. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui jika pemekaran sebagai kesempatan untuk pembangunan yang lebih baik dengan fokus pada kebutuhan lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat kekhawatiran akan dampaknya terhadap identitas dan budaya Nias, termasuk masyarakat Islam di sana. Sejumlah informan berharap agar kepentingan dan aspirasi masyarakat Islam diakomodasi, serta memiliki ruang untuk menjaga nilai-nilai agama dan budaya mereka. Selain itu, dapat dipastikan bahwa pemekaran tidak hanya membawa perubahan positif dalam infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga memperkuat persatuan dan kerukunan antar komunitas. Informan juga merasa penting untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan perdamaian, sehingga pemekaran dapat menjadi landasan kemajuan yang berkelanjutan bagi semua penduduk, termasuk masyarakat Islam Nias.

Dampak Pemekaran Terhadap Kehidupan Masyarakat Islam Nias

Pemekaran wilayah menimbulkan sejumlah dampak, terutama bidang social, ekonomi maupun politik terhadap Masyarakat Islam di Nias. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan.

Berdasarkan wawancara dengan Ust Thamrin Lahagu, dimana beliau mengatakan bahwa:

“Saya melihat bahwa pemekaran Provinsi Kepulauan Nias memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat Islam Nias secara sosial, ekonomi, dan politik. Secara sosial, pemekaran ini dapat mempengaruhi dinamika sosial di antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk komunitas Islam. Ada potensi untuk memperkuat rasa identitas lokal di antara masyarakat Islam Nias, tetapi juga perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya gesekan antar kelompok dalam konteks perubahan struktur pemerintahan. Dari segi ekonomi, pemekaran ini dapat membuka peluang baru untuk pengembangan ekonomi lokal, termasuk sektor-sektor seperti pariwisata dan perdagangan. Namun, hal ini juga dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi dalam jangka pendek akibat perubahan administratif dan redistribusi sumber daya. Dalam hal politik, pemekaran Provinsi Kepulauan Nias dapat membawa perubahan dalam representasi politik dan distribusi kekuasaan di tingkat lokal. Komunitas Islam Nias perlu memastikan bahwa kepentingan mereka tetap diakomodasi dan terwakili dalam proses politik baru yang akan terbentuk setelah pemekaran. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk aktif terlibat dalam proses pemekaran ini dan memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi kami sebagai masyarakat Islam Nias diakui dan diperhatikan secara dekat.”

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Pak Syamsuri Polem (PNS KESBANGPOL SUMUT) dimana beliau mengatakan bahwa:

“Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias berpotensi memberikan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang beragam bagi masyarakat Islam Nias. Secara sosial, dapat terjadi penyesuaian dalam dinamika komunitas. Dari segi ekonomi, terdapat peluang dan tantangan baru dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Politik dapat mengalami perubahan dalam partisipasi politik dan dinamika kekuasaan, baik positif maupun negatif. Penting bagi masyarakat, termasuk masyarakat Islam Nias, untuk berperan serta aktif dalam mengawasi dan berkontribusi pada proses pemekaran dan pembangunan selanjutnya.”

Wawancara berikutnya dilakukan dengan Pak Din Rahmadhani Aceh (Ketua GM IKMIN), dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa:

“Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat Islam Nias. Secara sosial, diharapkan adanya inklusivitas dan keberagaman yang lebih besar. Dari segi ekonomi, ada potensi peningkatan aksesibilitas terhadap sumber daya dan infrastruktur ekonomi, namun juga tantangan baru dalam pembagian kekayaan. Secara politik, pemekaran membuka ruang lebih besar bagi partisipasi politik masyarakat Islam Nias, tetapi perlu waspada terhadap potensi polarisasi politik. Pentingnya pemerintah baru memastikan bahwa kepentingan masyarakat Islam Nias tetap menjadi prioritas dalam pembangunan dan kebijakan publik.”

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan Rafsan Ali (PAN), dimana beliau mengatakan bahwa:

“Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias memiliki dampak sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan bagi masyarakat Islam Nias. Secara sosial, diharapkan adanya peningkatan akses terhadap pelayanan publik tanpa mengaburkan nilai-nilai budaya. Secara ekonomi, diharapkan adanya investasi baru dan peluang kerja, namun perlu memastikan distribusi ekonomi yang merata. Secara politik, diharapkan adanya pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat dan proses politik yang demokratis serta transparan.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa narasumber, dapat diketahui jika pemekaran wilayah ini dapat memberikan sejumlah dampak terhadap Masyarakat Islam Nias. Diantara dampak tersebut diantaranya yaitu, secara sosial, pemekaran ini dapat membawa perubahan dalam dinamika sosial masyarakat, baik dalam hal identitas maupun hubungan antarwarga. Pemekaran ini diharapkan akan membawa inklusivitas dan keberagaman yang lebih besar dalam struktur sosial masyarakat, sehingga setiap individu, termasuk komunitas Islam Nias, merasa diakui dan dihargai. Dari segi ekonomi, melihat adanya potensi positif dari pemekaran ini dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber daya dan infrastruktur ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk usaha-usaha ekonomi yang dikelola oleh masyarakat Islam Nias. Namun, pemekaran ini juga dapat membawa tantangan baru dalam hal pengelolaan sumber daya dan pembagian kekayaan yang adil. Secara politik, pemekaran ini bisa membuka ruang lebih besar bagi partisipasi politik masyarakat Islam Nias dalam pembentukan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Namun, diperlukan kewaspadaan terhadap potensi polarisasi politik yang dapat muncul sebagai dampak dari pemekaran ini. Oleh karena itu, diharap pemerintah baru yang terbentuk setelah pemekaran dapat memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat Islam Nias tetap menjadi prioritas dalam agenda pembangunan dan kebijakan publik di Provinsi Kepulauan Nias yang baru.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa proses pemekaran Provinsi Kepulauan Nias sebagai Calon Daerah Otonom Baru telah mengalami dinamika kompleks sejak awal deklarasinya pada tahun 2009 hingga proses Sidang Paripurna di DPR RI tahun 2014. Pemekaran wilayah ini mendapat pandangan yang beragam dari masyarakat, meskipun dianggap sebagai peluang untuk pembangunan yang lebih baik dengan fokus pada kebutuhan lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, ada kekhawatiran akan dampaknya terhadap identitas dan budaya Nias, termasuk masyarakat Islam di sana. Pemekaran ini berpotensi berdampak signifikan bagi komunitas Islam Nias secara sosial dan ekonomi. Secara politik, pemekaran membuka ruang partisipasi politik bagi komunitas Islam Nias, namun juga berpotensi untuk polarisasi politik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah baru untuk memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Islam Nias dalam agenda pembangunan dan kebijakan publik di Provinsi Kepulauan Nias yang baru terbentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Arafat. "Kajian dampak pemekaran wilayah terhadap pembangunan daerah (Studi Kasus: Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat)." (2011).
- Kholik, Saeful. "Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1 (2020): 56-70.
- Kusuma, Winanda, and Sieska Afriana Sintasari. "Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah Kerangka Hubungan Pusat Daerah." *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review* 1, no. 1 (2023): 64-73.

Telaumbanua, Erico Jaya Berkat. "KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) PROVINSI KEPULAUAN NIAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA." PhD diss., Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

Zebua, Ben Hansel N., and MY Tiyas Tinov. "Upaya Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias (Studi Kepentingan Elite Politik)." PhD diss., Riau University, 2017.